



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**LEMBAR KERJA EVALUASI  
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)  
DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)**

Tim Kerja

**PENINGKATAN  
KUALITAS  
PELAYANAN  
PUBLIK**

**BIRO HUMAS DAN PROTOKOL**

20  
22

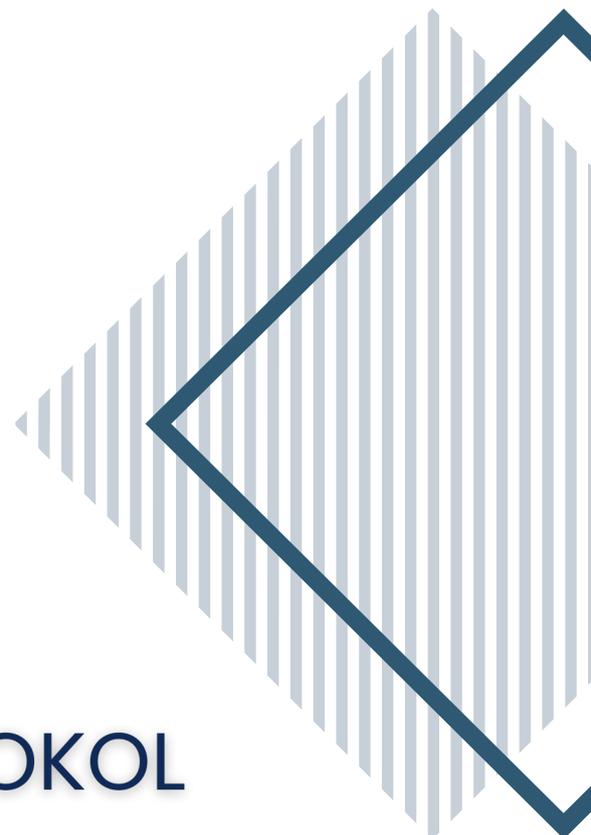


MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**LEMBAR KERJA EVALUASI  
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)  
DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)**

**TELAH DILAKUKAN EVALUASI ATAS PENANGANAN  
KELUHAN/MASUKAN DAN KONSULTASI**

**BIRO HUMAS DAN PROTOKOL**





# LEMBAR KERJA EVALUASI WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)

## Daftar Isi

- 1.1. Kekeliruan Penyebutan Jabatan pada Berita Laman MK (Penyampaian)
- 1.2. Kekeliruan Penyebutan Jabatan pada Berita Laman MK (Tindak Lanjut)
- 1.3. Kekeliruan Penyebutan Jabatan pada Berita Laman MK (Permohonan Maaf)
- 2.1. Surat Permohonan Menonaktifkan Kolom Komentar Youtube.
- 2.2. Disposisi Permohonan Menonaktifkan Kolom Komentar Youtube
- 2.3. Telaah Permohonan Menonaktifkan Kolom Komentar pada Youtube MK
- 3.1. Nota Dinas Koordinasi Perbaikan Kualitas Ruang Wartawan
- 3.2. Koordinasi Antarunit dalam Perbaikan dan Telaah Persekjen Berkenaan dengan PPID
- 3.2. Koordinasi Antarunit dalam Perbaikan Kualitas Ruang Wartawan
- 4.1. Nota Dinas Review Inspektur terhadap Persekjen Berkenaan dengan PPID
- 4.2. Usulan Biro HP Perbaikan dan Telaah Persekjen Berkenaan dengan PPID kepada Biro HAK

**BIRO HUMAS DAN PROTOKOL**

Saya, Ferdinand T Andi Lolo, mengajukan permintaan koreksi atas berita/press release Mahkamah Konstitusi. Berita dimaksud adalah: "Pemerintah Hadirkan Ahli dan Saksi dalam Sidang Uji UU Minerba" yang dapat diakses melalui tautan <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18140>

Sidang tersebut adalah sidang kelima Perkara Nomor 37/PUU-XIX/2021 Uji materiil Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan Undang-undnag Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), digelar pada Selasa 19 April 2022 di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi secara daring.

Dalam sidang tersebut saya memberikan Keterangan sebagai ahli Presiden/Pemerintah dari lingkup akademisi, yaitu Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Identitas dan asal instansi/Lembaga saya tercantum pada CV yang disampaikan ke yang mulia majelis persidangan sebagai salah satu syarat administrasi dan saya sebutkan diawal Keterangan saya pada saat sidang dengan agenda mendengarkan Keterangan ahli berlangsung.

Bagian dari berita tersebut yang saya minta untuk dikoreksi adalah "**Ahli Pemerintah Ferdinand T Andi Lolo, anggota Komisi Kejaksaan**" Saya adalah pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Karawaci Tangerang. Keanggotaan saya pada Komisi Kejaksaan RI berlangsung antara 2015-2019. Jika status saya masih aktif sebagai anggota Komisi Kejaksaan RI, tentu yang mulia majelis hakim akan menolak Keterangan saya dalam kapasitas ahli pemerintah sebagaimana ahli pemerintah lain didalam sidang yang ditolak dalam kapasitas sebagai ahli karena masih menjadi bagian dari pemerintah. Komisi kejaksaan berada dibawah Presiden, oleh karenanya anggota Komisi Kejaksaan adalah bagian dari pemerintah. Saya adalah ahli independen, tidak berada dibawah presiden ataupun terafiliasi dengan unit pemerintah manapun saat saya memberikan Keterangan.

Keterangan yang benar dan akurat adalah: "**Ahli Pemerintah Ferdinand T Andi Lolo, Universitas Pelita Harapan**" karena surat tugas saya sebagai ahli diterbitkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan atas permintaan pemerintah. Semua detail identitas dan asal instansi saya dapat dicek di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang mengarsipkan dokumen terkait perkara ini (surat tugas terlampir pada email ini).

Koreksi sangat penting dan perlu untuk dilakukan agar, pertama, masyarakat luas mendapat informasi yang benar dan akurat dan, kedua, para pihak yang sedang berperkara, terutama pemerintah tidak dirugikan (seolah-olah ahli yang dihadirkan pemerintah adalah ahli yang tidak independen karena merupakan bagian dari pemerintah).

Demikian saya sampaikan permintaan koreksi ini dengan harapan agar Humas Mahkamah Konstitusi MK dapat segera memperbaiki kekeliruan pemberitaan.

Hormat saya

Ferdinand T. Andi Lolo (FH-UPH)

# Detail Naskah

• [Keluar](#)

[Kembali](#)

[Teruskan](#)

[Nota Dinas](#)

[Ubah Metadata](#)

[Grafik](#)

- [Tindaklanjut Masuk](#)
- [Histori Naskah](#)
- [Metadata](#)
- [Status Pemberkasan](#)

Tampilkan  Data

Pencarian :

No	Tanggal & Jam	Asal Naskah	Tujuan Naskah	Keterangan	Pesan	
11	22-04-2022 19:06:04	Sekretaris Jenderal	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama dalam Negeri, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Disposisi (Biasa)	-Baik, noted. -ACC saran/review -Mohon diperbaiki. Buatkan surat permohonan maaf kpd ybs atas "human error" dimaksud. Tks. 	
12	22-04-2022 15:34:01	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sekretaris Jenderal	Nota Dinas (Biasa)	Menyampaikan telaah atas permohonan keberatan berita pers dari Saudara Ferdinand. Terima Kasih
13	22-04-2022 14:04:15	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama dalam Negeri	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol		Teruskan	Menyampaikan konsep nodin berkenaan dengan surat permintaan koreksi berita website. Suwun, Pak Karo.
14	22-04-2022 13:17:40	Ayuditha Marsaulina) <b>Penanda Tangan :</b> Heru Setiawan	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat		Teruskan	Menyampaikan konsep ND telaah dan tindak lanjut surat ahli pemerintah a.n. Ferdinand T. Andi Lolo <b>File Surat::</b>  <a href="#">file e-TTD 359_220422020324draf.docx</a> <a href="#">QR code aktif</a>
15	22-04-2022 12:36:28	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat	Analisis Berita (Raisa Ayuditha Marsaulina)		Disposisi (Biasa)	- Sa, menyambung pembicaraan di WA ya, ini disponya, tolong buat surat telaah ya. makasih Sa 

No	Tanggal & Jam	Asal Naskah	Tujuan Naskah	Keterangan	Pesan
16	22-04-2022 07:23:05	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama dalam Negeri	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat	Disposisi (Biasa)	mohon dibuatkan konsep nodin bahwa apa yang disampaikan Ferdinand benar adanya, kekeliruan ada di kita. Tugaskan Raisa (Analisis Berita). Saya sudah cek berita dan juga ketemu Penulisnya. Human error. Berita di web akan kita ubah sebagaimana faktanya bahwa Ferdinand itu dari UPH, dan sudah bukan Anggota Komisi Kejaksaan. Segera ya, hari ini harus kelar naik SIKD, setelah acc, ubah berita, lll email ke ybs. mohon maaf dan berterima kasih atas koreksinya. Tks.
17	21-04-2022 23:07:29	Sekretaris Jenderal	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama dalam Negeri, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	<b>Tembusan :</b> Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretaris Sekjen MK (Haifa Arief Lubis), Analisis Hukum (Puguh Apriyanto), Pengelola Situs Web (Bobi Arianto, A.Md.)	Disposisi (Biasa)  -Mohon ditelaah dan saran.
18	21-04-2022 08:00:23	Ferdinand Andi Lolo	Sekretaris Jenderal	Surat Masuk	<p><b>File Surat</b></p> <p> <a href="#">klik file</a> Ferdinand.JPG</p> <p> <a href="#">klik file</a> SURAT TUGAS Ahli Ferdinand Andi Lolo.pdf</p>

Menampilkan 11 sampai 18 dari 18 data  
AwalKembali12LanjutAkhir



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## NOTA DINAS 1552/2300/HP.15/04/2022

Yth. : Bapak Sekretaris Jenderal  
Dari : Kepala Biro Humas dan Protokol  
Perihal : Tindak Lanjut Surat Ahli Pemerintah Ferdinand T. Andi Lolo  
Berkenaan dengan Dugaan Kekeliruan Pencantuman Jabatan  
Tanggal : 22 April 2022

Dengan hormat, menindaklanjuti surat yang dikirimkan oleh Ferdinand T. Andi Lolo kepada MK melalui email [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id) perihal kekeliruan penyebutan jabatan yang bersangkutan pada berita web <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18140>, kami sampaikan sebagai berikut.

1. Saudara Ferdinand T. Andi Lolo menyampaikan bahwa pada berita web dimaksud, yang bersangkutan disebut sebagai “Anggota Komisi Kejaksaan”;
2. Terhadap hal tersebut, yang bersangkutan mengakui bahwa keanggotaannya pada Komisi Kejaksaan RI telah berakhir pada 2019. Dengan kata lain, keanggotaan yang bersangkutan pada instansi dimaksud telah berakhir sehingga kehadiran yang bersangkutan pada Sidang Perkara Nomor 37/PUU-XIX/2021 tidaklah dalam kapasitas sebagai anggota komisi, melainkan sepenuhnya akademisi sesuai penugasan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
3. Berkenaan dengan hal tersebut, kami melakukan telaah secara seksama, termasuk menyangkut surat tugas yang bersangkutan dan menyimpulkan bahwa benar terdapat kekeliruan penyebutan jabatan pada berita web dimaksud;
4. Untuk itu, kami bermaksud segera melakukan koreksi pada kedudukan yang bersangkutan dalam berita web yang semula “Ahli Pemerintah Ferdinand T. Andi Lolo, anggota Komisi Kejaksaan” menjadi “Ahli Pemerintah Ferdinand T. Andi Lolo, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan”. Seiring dengan itu, kami juga akan membalas email yang bersangkutan untuk menyampaikan permohonan maaf sekaligus pemberitahuan perihal koreksi berita dimaksud;

Demikian kami sampaikan, mohon arahan Bapak. Atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Humas dan Protokol, **Heru Setiawan**



Digital Signature  
mk335367273220422033229

### Permohonan Agar Komentar atau Kolom Komentar pada Youtube di Non Aktifkan

 **Jovi Andrea Bachtiar, S.H** <joviandreabachtiar@gmail.com>  
Today, 5:08 AM  
Panitera Mahkamah Konstitusi

Reply all

#### Inbox



Show all 8 attachments (5 MB) Download all

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Salam sejahtera bagi kita semua.

Salam hormat saya sampaikan kepada Sekretariat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bersamaan dengan ini saya, Jovi Andrea Bachtiar memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan menghapus komentar atau kolom komentar pada video yang diupload pada YouTube Channel Mahkamah Konstitusi dengan link <https://youtu.be/YznW3XroxPo>. Karena saya kurang berkenan dengan cara seseorang dalam penyelesaian suatu permasalahan terhadap diri saya pribadi. Terlebih permasalahan tersebut muncul karena seorang tersebut (seseorang yang mengirimkan komentar pada postingan a quo) mencabut kuasa sehari sebelum keesokan harinya saya dan rekan pengacara dari Lamping hendak menuju Palembang. Seseorang yang mencabut kuasa secara sepihak tersebut mungkin tidak berkenan apabila dalam penyelesaian permasalahan hukumnya terkait tanah diselesaikan melalui strategi non litigasi melalui mediasi dengan pihak lawan. Parahnya sekalipun sudah dijelaskan berulang kali terkait tidak adanya kewajiban mengembalikan uang yang telah ditransfer pasca pencabutan kuasa secara sepihak, seorang tersebut terus menerus meminta agar uang dikembalikan bahkan dengan cara yang tidak etis, yaitu mengirimkan komentar pada setiap postingan YouTube dimana terdapat saya didalamnya. Berikut terlampir bukti chat personal saya dengan seorang tersebut yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi sekretariat Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menghapus komentar atau menonaktifkan kolom komentar pada postingan tersebut. Atas perhatian dan kerja sama nya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

# Sistem Informasi Kearsipan Dinamis

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Selamat Datang **Andhini Sary Fauzla** Anda Login Sebagai **Pejabat Struktural** | [Ubah Kata Sandi](#)

- Beranda
- Draf Surat
- Registrasi Naskah
- Naskah Masuk
- Log Registrasi
- Berkas
- Laporan
- Mantap
- Keluar

## Detail Naskah

Selasa, 24 Mei 2022, Jam 15:04:03

- Kembali
- Teruskan
- Nota Dinas
- Ubah Metadata
- Grafik

- Tindaklanjut Masuk
- Histori Naskah
- Metadata
- Status Pemberkasan

Tampilkan 10 Data Pencarian :

No	Tanggal & Jam	Asal Naskah	Tujuan Naskah	Keterangan	Pesan
11	20-07-2021 20:33:34	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama dalam Negeri	Disposisi (Biasa)	- Segera tindaklanjuti Mohon segera dipelajari dan di diskusikan dengan tim medsos. Jika sudah jelas permasalahannya mohon dibuatkan saran kepada Bapak Sekjen untuk mendapatkan persetujuan tindak lanjut. Terima Kasih
12	19-07-2021 18:10:45	Jovi Andrea Bachtiar	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Surat Masuk	<b>File Surat</b> klik file PHOTO-2021-07-19-18-06-17.jpg

Menampilkan 11 sampai 12 dari 12 data Awal Kembali 1 2 Lanjut Akhir

4	20:36:42	Jenderal	dalam Negeri,Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	(Biasa)	sebab orang lain yg punya masalah, MK ditarik-tarik menjadi bagian dari masalah orang lain yg tidak produktif bagi MK. Tks.
5	21-07-2021 17:38:43	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretaris Jenderal	Nota Dinas (Biasa)	Penyampalan permohonan penutupan komentar terkait berita dua menit thd pemberitaan dimaksud dalam surat. Terima kasih
6	21-07-2021 14:36:14	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama dalam Negeri	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Nota Dinas (Biasa)	Menyampaikan nodin telaah permohonan penghapusan kolom komentar Berita 2 Menit, Pak Karo. Moon arahan dan persetujuan. Suwun..
7	21-07-2021 12:57:44	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama dalam Negeri	Teruskan	- Pak Kabag, mohon koreksi dan arahan terkait telaah berikut. - makasih
8	21-07-2021 11:53:23	Pengelola Humas dan Media Massa-5 (Andhini Sayu Fa <b>Penanda Tangan</b> : Heru Setiawan	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama dalam Negeri,Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat	Nota Dinas (Biasa)	ND Telaahan Permohonan Jovie Andrea <b>File Surat:</b> file e-TTD Telaah Permohonan Menonaktifkan Kolom Komentar pada Youtube MK.docx <a href="#">QR code aktif</a>
9	21-07-2021 09:36:35	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat	Pengelola Humas dan Media Massa-5 (Andhini Sayu Fa	Disposisi (Biasa)	- Dhin, tolong dapat dibuat telaah terkait masalah dimaksud, utk dapat disampaikan pula permasalahannya, dan berikan masukan utk masalah yg disampaikan. - setelahnya, nanti kita bahass - makasih dhin
10	20-07-2021 21:43:14	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama dalam Negeri	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat	Disposisi (Biasa)	Mohon tugaskan Dhini menyusun telaah terkait hal ini, plus rekomendasinya. Segera ya....tks.

# Sistem Informasi Kearsipan Dinamis

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Selamat Datang **Andhini Sayu Fauzia** Anda Login Sebagai **Pejabat Struktural** | [Ubah Kata Sandi](#)

PENCARIAN

Beranda | [Draf Surat](#) | [Registrasi Naskah](#) | [Naskah Masuk](#) | [Log Registrasi](#) | [Berkas](#) | [Laporan](#) | [Mantap](#) | [Keluar](#)

Selasa, 24 Mei 2022, Jam 15:05:27

## Detail Naskah

[Kembali](#) | [Teruskan](#) | [Nota Dinas](#) | [Ubah Metadata](#) | [Grafik](#)

[Tindaklanjuti Masuk](#) | [Histori Naskah](#) | [Metadata](#) | [Status Pemberkasan](#)

No	Tanggal & Jam	Asal Naskah	Tujuan Naskah	Keterangan	Pesan
1	22-07-2021 20:09:23	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat	Pengelola Media Center dan Komitran Media (Tiara Agustina),Pengelola Humas dan Media Massa-5 (Andhini Sayu Fa.Spesialis Media Sosial (Zahra Marida),Tenaga Spesial Media Sosial (Ilham Erwin)	Disposisi (Biasa)	- tolong tindaklanjuti dispo Pimpinan utk menonaktifkan kolom komentar. - Terima kasih
2	22-07-2021 20:00:10	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama dalam Negeri	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat	Disposisi (Biasa)	Mohon dilaksanakan arahan Pimpinan. Non aktifkan kolom chat Youtube MK. Tks.
3	21-07-2021 21:14:13	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama dalam Negeri,Spesialis Media Sosial (Zahra Marida),Tenaga Spesial Media Sosial (Ilham Erwin)	Disposisi (Biasa)	- Segera tindaklanjuti Mohon segera dilaksanakan arahan bapak sejen untuk mematikan semua komentar di youtube. Terima kasih
4	21-07-2021 20:36:42	Sekretaris Jenderal	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama dalam Negeri,Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Disposisi (Biasa)	- ACC, permohonan dimaksud. Sebaiknya di nonaktifkan saja chat/kolom komentar di kanal youtube MK sebab orang lain yg punya masalah, MK ditarik-tarik menjadi bagian dari masalah orang lain yg tidak produktif bagi MK. Tks.

**NOTA DINAS**  
**NOMOR 412/2300/HP.01.04/07/2021**

Kepada Yth : Sekretaris Jenderal  
Dari : Kepala Biro Humas dan Protokol  
Perihal : Telaah Permohonan Menonaktifkan Kolom Komentar pada Youtube MK  
Tanggal : 21 Juli 2021

---

Dengan hormat kami sampaikan bahwa menindaklanjuti permohonan saudara Jovie Andrea Bachtiar, S.H, terkait menonaktifkan kolom komentar pada Youtube MK, kami sampaikan telaahan sebagai berikut:

1. Konten video yang dimaksud oleh saudara Jovie Andrea merupakan konten Berita 2 Menit MK mengenai sidang pengujian UU KPK Tahun 2019, link terlampir <https://www.youtube.com/watch?v=YznW3XroxPo>.
2. Berita 2 menit MK, berisi tentang rangkuman materi persidangan MK yang dikemas dengan durasi yang lebih singkat sehingga memudahkan masyarakat untuk lebih memahami permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi.
3. Tim media sosial MK, saat ini memutuskan untuk membuka kolom komentar pada konten Berita 2 menit, untuk memberikan ruang dan tempat bagi Courtizen berpendapat. Hal ini berlaku juga untuk konten *Podcast*, Iklan Layanan Masyarakat dan konten non sidang lainnya.
4. Tim media sosial MK menutup kolom komentar apabila sidang sedang berlangsung (*live*), hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perang komentar dari pihak berperkara, baik yang mendukung ataupun yang tidak mendukung.
5. Terkait permohonan saudara Jovie Andrea, tim media sosial MK menyarankan untuk menonaktifkan kolom komentar pada konten Berita 2 menit yang dimaksud oleh saudara Jovie Andrea saja, namun tidak untuk konten Berita 2 menit lainnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Humas dan Protokol, **Heru Setiawan**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## NOTA DINAS

Nomor 194/2300/HP.00.04/04/2019

Yth. : Kepala Biro Umum  
Dari : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol  
Perihal : Permohonan Pengadaan CCTV, Bantuan Pengamanan, dan Penataan Kembali Ruang Pers MK  
Tanggal : 16 April 2019

Dengan hormat, dalam rangka mengoptimalkan Publikasi dan Penyebarluasan informasi kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi oleh Para Pers, Biro Humas dan Protokol telah melakukan diskusi dengan Para Pers di Media Center dengan kesimpulan antara lain diperlukan penambahan 1 (satu) titik CCTV untuk keperluan pengamanan Para Pers serta peningkatan kapasitas ruang Media Center untuk keperluan peningkatan layanan dan kenyamanan pers dalam liputan penanganan perkara php pemilu di MK.

Guna mewujudkan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak untuk dapat memberikan dukungan kepada Para Pers MK sebagai berikut:

No.	Unit Terkait	Hal
1	Unit Layanan Pengadaan	Pengadaan CCTV di Ruang Pers MK
2	Unit Pengamanan	Bantuan Pengamanan di Ruang Pers MK
3	Unit Rumah Tangga	Penataan Kembali Ruang Pers MK

Besar harapan kami mendapatkan dukungan, bantuan dan koordinasi dari Biro Umum untuk peningkatan layanan yang berkualitas dan kenyamanan Para Pers dalam rangka publikasi dan penyebarluasan informasi penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2019.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Humas dan Protokol

**Heru Setiawan**

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Inspektur;
3. Kepala Bagian Pengadaan dan Penatausahaan BMN;
4. Kepala Bagian Rumah Tangga, Arsip dan Ekspedisi.



Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol  
Heru Setiawan - NIP. 19690609 199303 1 001  
Digital Signature - mk4242844699

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id



- [Tindaklanjut Masuk](#)
- [Histori Naskah](#)
- [Metadata](#)
- [Status Pemberkasan](#)

Tampilkan  DataPencarian : 

No	Tanggal & Jam	Asal Naskah	Tujuan Naskah	Keterangan	Pesan
41	12-08-2019 18:57:06	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama dalam Negeri	Disposisi (Biasa)	Pak Kabag, memperhatikan berbagai disposisi terkait hal dimaksud, kiranya Karo HAK memberikan disposisi adanya rapat. Mohon dikordinasikan rapat 3 unit, Biro HAK, Biro HP dan Inspektorat untuk menyatukan pemahaman terkait TL temuan dimaksud 
42	12-08-2019 08:48:27	Auditor Pertama (Dhita Cantika Megatania)	Inspektorat (Dillon Devin Zebadiah)	Teruskan	pantau TL Audit Kinerjanya lebih lanjut
43	12-08-2019 07:19:41	Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan, Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan	Disposisi (Biasa)	_Koordinasikan dengan instansi terkait -Segera tindaklanjuti -Tugaskan Staf Jadwal rapat terbatas dengan Unit2 terkait layanan publik _Koordinasikan dengan instansi terkait 
44	12-08-2019 07:18:10	Inspektur	Auditor Pertama (Dhita Cantika Megatania)	Disposisi (Biasa)	_Koordinasikan dengan instansi terkait -Segera tindaklanjuti untuk dimonitor dan ikuti perkembangannya laporkan 
45	09-08-2019 22:59:47	Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan	Kepala Subbagian Hukum, Kepala Subbagian Tata Usaha Kepaniteraan, Analisis Hukum (Paulus Rudy Calvin Sinaga)	Disposisi (Biasa)	mohon untuk segera ditindaklanjuti, koordinasi dengan Biro HP terkait permohonan dimaksud 
46	09-08-2019 19:18:30	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama dalam Negeri	<b>Tembusan :</b> Inspektur, Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Dokumen Final	

No	Tanggal & Jam	Asal Naskah	Tujuan Naskah	Keterangan	Pesan	
47	09-08-2019 19:15:53	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama dalam Negeri	Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan	<b>Tembusan</b> : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat	Disposisi (Biasa)	
48	09-08-2019 16:15:35	Analisis Berita (Raisa Ayuditha Marsaulina)	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama dalam Negeri	Nota Dinas (Biasa)	Lampiran dari Mas Fajar <b>File Surat</b> <a href="#">klik file</a> Lampiran Usulan Penyempurnaan Persekjen PPID.doc	
49	09-08-2019 09:35:54	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat	Analisis Berita (Raisa Ayuditha Marsaulina)	Disposisi (Biasa)	- Raisa mohon dibantu untuk ditindaklanjuti disposisi Pak Kabag. - Terima kasih Raisa	
50	08-08-2019 20:14:55	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama dalam Negeri	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Analisis Berita (Raisa Ayuditha Marsaulina)	Disposisi (Biasa)	Raisa, lampirannya mohon dibuat dalam format word di luar saja, nanti dijadikan sebagai attachment. Lampiran juga diperbaiki.	

Menampilkan 41 sampai 50 dari 52 data

AwalKembali123456LanjutAkhir

Hak Cipta © 2016 Arsip Nasional Republik Indonesia

- [Tindaklanjut Masuk](#)
- [Histori Naskah](#)
- [Metadata](#)
- [Status Pemberkasan](#)

Tampilkan  DataPencarian : 

No	Tanggal & Jam	Asal Naskah	Tujuan Naskah	Keterangan	Pesan
11	12-04-2019 13:53:06	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sekretaris Jenderal	Nota Dinas (Biasa)	Pak Sekjen kami mohon ijin memasang 1 titik cctv di media center ditambah dengan penataan ulang ruang media center agar lebih banyak menampung media dalam rangka penanganan perkara pemilu. Mohon persetujuan dan arahan. Jika Bapak tidak berpendapat lain kami akan sampaikan ND kami ke Biro Umum. Terima Kasih atas arahan dan perkenan pak sekjen
12	12-04-2019 13:28:38	Analisis Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum (Muhammad Halim) <b>Penanda Tangan :</b> Heru Setiawan	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama dalam Negeri, Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat	Nota Dinas (Biasa)	<p><b>File Surat::</b></p> <p> <a href="#">file e-TTD</a></p> <p>QR code tidak aktif</p> <p><a href="#">Aktifkan QR Code</a></p>

Menampilkan 11 sampai 12 dari 12 data

AwalKembali12LanjutAkhir

- [Tindaklanjut Masuk](#)
- [Histori Naskah](#)
- [Metadata](#)
- [Status Pemberkasan](#)

Tampilkan  DataPencarian : 

No	Tanggal & Jam	Asal Naskah	Tujuan Naskah	Keterangan	Pesan
1	23-04-2019 11:30:20	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama dalam Negeri	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Pengelola Bahan Informasi (Tiara Agustina), Analis Berita (Raisa Ayuditha Marsaulina)	Disposisi (Biasa)	Mohon dikoordinasikan dengan Bagian Rumah Tangga untuk pembenahan pressroom kita. 
2	22-04-2019 13:30:11	Kepala Biro Umum	Kepala Bagian Pengamanan Dalam	Disposisi (Biasa)	Koordinasikan dg humas ttg penempatan/titik pemasangan cctv,,,laporkan. 
3	22-04-2019 09:30:27	Kepala Subbagian Pengadaan	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Razi Fajari Farghani)	Disposisi (Biasa)	- koordinasi dengan bag keamanan untuk RAB dan HPS  _ Dilaksanakan sesuai _ ketentuan dan prosedur _ Koordinasikan dengan _ instansi terkait
4	18-04-2019 17:57:50	Kepala Bagian Pengadaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	Kepala Subbagian Pengadaan, Kepala Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara, Kepala Subbagian Akuntansi dan Laporan BMN, Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Ika Kurnia Aryani)	Disposisi (Biasa)	-Koordinasikan dengan Bag Pengamanan, bila dari Bag Pengamanan rekondasi urgensinya laik, agar segera proses pengadaan sesuai ketentuan. Terlebih dulu susun HPS dan KAK nya dibantu pelaksanaannya dan laporkan hasil pelaksanaannya secara berjenjang ke Pak Karo umum. 
5	18-04-2019 17:31:45	Kepala Bagian Pengamanan Dalam	Pengelola Pengamanan-1 (Ricky Nafri Habibanda) <b>Tembusan</b> : Kepala Biro Umum	Teruskan	Kabag RT & AE untuk dilakukan penataan ruang kerja,,,koord dg humas Kabag P2 BMN untuk diadakan sesuai ketentuan,,,koord dg humas Kabag PAM untuk dilakukan pam,,,,koord dg humas Laporkan.
6	18-04-2019 08:50:01	Kepala Biro Umum	Kepala Bagian Rumah Tangga, Arsip dan Ekspedisi, Kepala Bagian Pengadaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara, Kepala Bagian Pengamanan Dalam	Disposisi (Biasa)	Kabag RT & AE untuk dilakukan penataan ruang kerja,,,koord dg humas Kabag P2 BMN untuk diadakan sesuai ketentuan,,,koord dg humas Kabag PAM untuk dilakukan pam,,,,koord dg humas Laporkan. 
7	16-04-2019 15:57:51	Kepala Subbagian Rumah Tangga	Pengelola Sarana dan Prasarana-2 (Novena Jati Nugr, Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan (Wibisana Ferry)	Disposisi (Biasa)	Cuktaw 

No	Tanggal & Jam	Asal Naskah	Tujuan Naskah	Keterangan	Pesan
8	16-04-2019 08:00:51	Kepala Bagian Rumah Tangga, Arsip dan Ekspedisi	Kepala Subbagian Rumah Tangga	Disposisi (Biasa)	Koordinasikan konsep penataan ruang pers yg diharapkan. 
9	16-04-2019 07:55:19	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kepala Biro Umum, Kepala Bagian Rumah Tangga, Arsip dan Ekspedisi, Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepala Bagian Pengadaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara, Kepala Subbagian Pengadaan, Kepala Bagian Pengamanan Dalam	Nota Dinas (Biasa)	ACC utk ditindaklanjuti -sesuai ketentuan, prosedur, dan AUPB. 
10	15-04-2019 22:43:06	Sekretaris Jenderal	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama dalam Negeri	Disposisi (Biasa)	-mohon diperlihatkan konsepnya. -Laporkan perkembangan dan hasilnya. -Terima Kasih.

Menampilkan 1 sampai 10 dari 12 data  
[Awal](#)[Kembali](#)[12](#)[Lanjut](#)[Akhir](#)



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## NOTA DINAS

Nomor 369/2900/PW.01/08/2019

Kepada Yth. : Kepala Biro Humas dan Protokol  
Dari : Inspektur  
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Bidang Kinerja Biro Humas dan Protokol  
Tanggal : 01 Agustus 2019

Dengan hormat, sesuai Surat Tugas nomor 0.3/2900/PW.01/07/2019 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Bidang kinerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi berikut kami lampirkan perkembangan tindak lanjut atas temuan APIP bidang kinerja Biro Humas dan Protokol.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon sekiranya bukti perkembangan tindak lanjut dapat kami terima **paling lambat Rabu, 7 Agustus 2019** sebagai bahan laporan pemantauan tindak lanjut semester I. Apabila unit kerja menyerahkan lewat dari waktu tersebut, maka bukti perkembangan tindak lanjut akan kami laporkan pada periode berikutnya.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama dan perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur

Pawit Haryanto





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## NOTA DINAS

Nomor 91//HK.01/08/2019

Yth. : Kepala Bagian Hukum dan TU Kepaniteraan  
Dari : Kepala Bagian Humas dan KSDN  
Perihal : Usulan Perbaikan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2013 dan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2018  
Tanggal : 09 Agustus 2019

Dengan hormat, sehubungan dengan hasil audit kinerja oleh Inspektorat terkait dengan Pedoman Standar Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Jangka Penyelesaian, Produk Layanan, serta Kompetensi Pelaksana, direkomendasikan melakukan penyempurnaan dan penyelarasan peraturan internal mengenai pelayanan informasi publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai bentuk tindaklanjut atas hasil audit kinerja tersebut, kami mengusulkan penyempurnaan terhadap (1) Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan (2) Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 (terlampir).

Untuk itu, kami mohon koordinasi dan bantuan Ibu terkait dengan usulan penyempurnaan peraturan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Humas dan KSDN,

**Fajar Laksono**

Tembusan:

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
2. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
3. Inspektur.



*Digital Signature-mk1820264973*

